

BAB V

PENUTUP

5.1. Kesimpulan

Setelah melakukan perhitungan dan analisis pada setiap indikator dalam penelitian ini, peneliti menarik kesimpulan bahwa budaya patriarki terhadap perilaku memilih masyarakat di tujuh dapil di Provinsi Sulawesi Selatan, cukup berpengaruh. Adapun kesimpulan mendalam terkait budaya patriarki dan perilaku memilih adalah sebagai berikut;

Dari dua variabel, yaitu variabel budaya patriarki dan variabel perilaku memilih yang masing-masing memiliki empat indikator untuk diukur. Pada variabel budaya patriarki, indikator “kesetaraan dalam berumah tangga”, mayoritas responden sangat setuju jika ada kesetaraan antara perempuan dan laki-laki dalam ranah rumah tangga. Begitupun pada Indikator lainnya, “kesetaraan dalam bermasyarakat, dan “kesetaraan dalam berpolitik” responden mayoritas sangat setuju, meskipun masih ada juga yang bersikap netral terhadap pilihan tersebut. Kemudian, untuk indikator “memilih caleg berdasarkan kedekatan antar gender”, mayoritas responden tidak setuju dengan pernyataan pada indikator tersebut.

Sedangkan untuk variabel perilaku memilih, dengan indikator “memilih berdasarkan *privilege*”, mayoritas responden sangat setuju pada pernyataan tersebut. Kemudian untuk indikator “memilih caleg perempuan berdasarkan visi/misi”, “memilih perempuan berdasarkan kesadaran”, dan “memilih perempuan di Pemilu berikutnya” berdasarkan data yang peneliti himpun, mayoritas responden setuju dengan pernyataan-pernyataan pada indikator tersebut.

Selanjutnya, hasil dari perhitungan menggunakan SPSS, dengan uji validitas masing-masing indikator dari dua variabel, menghasilkan nilai di atas 0,5 yang menunjukkan setiap butir jawaban dari responden dianggap valid. Dengan kesimpulan bahwa hubungan antara budaya patriarki dan perilaku memilih, menghasilkan nilai koefisien yang terstandarisasi (*Unstandardized Coefficients*) sebesar 0.315 dan nilai koefisien terstandirdisasi (*Standardized*

Coefficients) sebesar 0.295. Nilai koefisien tersebut bertanda positif yang menjelaskan bahwa budaya patriarki cukup mempengaruhi perilaku memilih masyarakat Sulsel. Uji parsial (Uji T) juga menghasilkan nilai t-hitung sebesar $3.051 > t\text{-tabel}$ sebesar 1.984, dengan menggunakan kaidah hitungan nilai r tabel pada *degree of freedom* (df) = $n-2$.

Berangkat dari data tersebut, dengan besaran pengaruh variabel budaya patriarki terhadap perilaku memilih berdasarkan hitungan koefisien determinasi sebesar 0,087 (8,7 persen). Dimana dalam pedoman skala korelasi *pearson* angka tersebut menunjukkan keterkaitan antara budaya patriarki dengan perilaku Memilih masuk dalam kategori lemah, artinya nilai-nilai patriarki di Sulsel tidak mempengaruhi responden dalam menentukan pilihan mereka pada pemilihan legislatif 2019. Meskipun belum sesuai dengan ekspektasi bahwa perempuan bisa memenuhi kouta 30 persen di lembaga legislatif Sulsel, setidaknya keterpilihan perempuan selalu meningkat sejak Pemilu 2004. Maka, peneliti dapat menarik kesimpulan sekaligus menjawab kedua rumusan masalah pada penelitian ini, yaitu:

1. Status gender tidak mempengaruhi pilihan responden dalam pemilihan legislatif DPRD Sulsel tahun 2019. Selain korelasi koefisien *pearson* dan korelasi determinasi pada hasil olah data melalui SPSS menunjukkan angka 0.295 dan 0.087, dimana angka tersebut masuk dalam kategori lemah pada standar pedoman uji korelasi, juga bisa dilihat secara spesifik pada tabel 3.21. dimana mayoritas responden (61 persen) menjawab tidak setuju pada pertanyaan “apakah dalam memilih calon legislatif dengan melihat kedekatan antar sesama gender”, selebihnya responden menjawab sangat tidak setuju dengan angka 39 persen.
2. Nilai-nilai patriarki tentang kedudukan perempuan dalam masyarakat tidak mempengaruhi pilihan responden dalam pemilihan legislatif DPRD Sulsel tahun 2019. Bahwa praktik patriarki masih terjadi di Sulsel, seperti yang peneliti

gambarkan di Bab dua pada penelitian ini, tetapi hal tersebut tidak mempengaruhi pilihan responden dalam memilih calon legislatif tahun 2019.

Temuan tersebut mematahkan stigma bahwa perilaku memilih masyarakat Sulsel masih dipengaruhi status gender dan nilai-nilai patriarki dalam menentukan pilihan mereka untuk memilih anggota legislatif DPRD Sulsel karena terdapat *pappaseng* atau petuah yang menyatakan perempuan tidak layak untuk mengisi jabatan publik sehingga membuat konstruk sosial masyarakat Sulsel yang cenderung patriarki.

Meskipun korelasi dan determinasi antara budaya patriarki dan perilaku memilih masuk dalam kategori lemah, tetapi masih ada responden yang menyetujui memilih caleg perempuan berdasarkan “*privilege*” yang dimiliki. Meskipun tidak ada salahnya bagi perempuan yang memiliki *privilege* untuk maju sebagai wakil rakyat, karena berdasarkan undang-undang bahwa setiap orang memiliki hak untuk dipilih, tetapi pemilih tidak menjadikan *privilege* sebagai alasan utama untuk memilih caleg perempuan, karena dikhawatirkan terdapat kecenderungan pada politik kekerabatan yang semakin menguat berpotensi dimanfaatkan oleh keluarga politik dengan mengoptimalkan jaringan politik, sosial dan kekerabatan sehingga memperoleh dukungan publik yang cukup besar. Oleh karena itu, upaya untuk meminimalisir politik kekerabatan perlu dilakukan dengan membangun hubungan simbiosis mutualisme antara partai politik dengan masyarakat, yang mana partai merekrut kandidat yang berkualitas secara demokratis dan masyarakat cerdas memilih kandidat yang berkualitas untuk mewakili mereka (Purwaningsih, 2015).

Hal tersebut didukung oleh fakta bahwa mayoritas caleg yang terpilih pada pemilihan legislatif Sulsel tahun 2019 memiliki *privilege*. *Privilege* dalam konteks Pemilu adalah politik kekerabatan, merujuk kepada caleg yang memiliki kerabat yang telah menduduki jabatan yang sama lebih dulu, dimana caleg memiliki koneksi politik, atau masuk dalam lingkaran oligarki.

Berikut adalah nama-nama caleg perempuan terpilih di DPRD Sulsel 2019 yang memiliki *privilege*

Tabel 5. 1 Jaringan Politik Caleg Perempuan Terpilih DPRD Sulsel 2019

Nama	Jaringan Politik Kekerabatan
Andi Rachmatika Dewi	Keponakan Walikota Makassar 2004-2009, 2009-2014 (Ilham Arief Sirajuddin)
Andi Ina Kartika	Putri Politisi Senior Partai Golkar Sulsel (Andi Tja Tjambolang)
Andi Azizah Irma	Putri Bupati Kab. Pinrang 2019-2024 (Andi Irwan Hamid)
A. Ayu Andira	Anak Kandung Anggota DPRD Bulukumba (Abu Thalib)
A. Debbie Purnama	Istri Bendahara umum Golkar (Rusdin Abdullah)
A. Ayu Andira	Anak Kandung Anggota DPRD Bulukumba (Abu Thalib)
Andi Nirawati	Istri Legislator DPR RI 2019-2024 (Kamrussamad)
Desy Susanti	Ipar Pimpinan Partai Nasdem Sulsel (Rusdi Masse)
Reski Mulfiati Lutfi	Menantu Menteri Pertanian 2019-2023 dan Gubernur Sulsel 2008-2013, 2013-2018 (Syahrul Yasin Limpo)
Sarwindey T Biringkanae	Putri Bupati Tana Toraja 2016-2021 (Nicodemus Biringkanae)
Vonny Ameliani	Menantu Sekertaris Daerah Kab. Jeneponto (Syafuruddin Nurdin)

Sumber: (Nur, 2021)

Dengan masih banyaknya caleg yang terpilih memiliki jaringan politik kekerabatan, menandakan belum berjalannya proses pelembagaan, kaderisasi dan rekrutment politik secara efektif yang seharusnya dilakukan partai politik. Kondisi ini sejalan dengan pragmatisme partai politik untuk memenangkan kontestasi elektoral dan hanya tertarik mengusung kandidat yang memiliki modal ekonomi, politik dan sosial yang kuat, meskipun tidak berasal dari kader partai (Rahmatunnisa, 2021).

Kuatnya fenomena politik kekerabatan di Sulawesi Selatan selain karena pewarisan elit struktural maupun fungsional, juga dipengaruhi oleh sosialisasi politik yang ada dalam keluarga. Dalam keluarga Syahrul Yasin Limpo misalnya, diskusi ataupun pembicaraan tentang politik dilakukan secara terus-menerus sehingga menumbuhkan minat pada politik sejak dini di kalangan keluarga besarnya (Purwaningsih, 2015).

Dari perspektif perilaku memilih, responden yang menyetujui memilih caleg perempuan berdasarkan *privilege* yang dimiliki, fenomena tersebut bisa dikaitkan dengan teori model psikologis atau aliran Michigan, menurut aliran ini terdapat beberapa aspek yang mempengaruhi pilihan seseorang yaitu keterikatan seseorang dalam partai politik, orientasi seseorang terhadap calon anggota parlemen, orientasi seseorang terhadap isu-isu politik perasaan dekat dan mengidentikkan diri dengan partai politik atau *figure* (tokoh) tertentu secara psikologis akan menghubungkan orang itu (pemilih) dengan masalah-masalah politik melalui Tokoh atau bahkan kerabat tokoh yang mereka percayai sebagai perantara. Padahal, tidak ada jaminan bahwa kerabat tokoh tersebut memiliki kapasitas dan kapabilitas yang sama dengan tokoh yang mereka percayai. Tidak menutup kemungkinan, caleg yang merupakan kerabat dari tokoh politik yang lebih dulu menjabat sebagai politisi, hanya mengandalkan nama besar keluarganya untuk meraih suara, bukan dari kualifikasi yang dibutuhkan untuk menjadi wakil rakyat.

Menurut Wasisto Rahardjo Djati dalam Purwaningsih, (2015), Kekerabatan dalam demokrasi lokal dipengaruhi oleh berbagai sumber politik seperti populisme, tribalisme dan feodalisme yang ketiganya membentuk tipologi rezim dinasti politik yang berbeda di Indonesia. Menurut Wasisto, karakter politik kekerabatan di Sulsel adalah *tribalism dynasties* yang terbentuk dari reproduksi ritus-ritus budaya etnis, ikatan primordialisme, klan politik, dan stratifikasi sosial.

Peran seorang ketokohan dalam proses politik memang signifikan terutama untuk mempengaruhi pemilih. Pada Pemilu legislatif, ketokohan pemimpin partai dan calon anggota legislatif memiliki potensi dalam mempengaruhi perilaku pemilih untuk memutuskan apakah memilih partai atau calon dari partai tokoh yang bersangkutan. Ketokohan yang kuat akan membentuk sikap seorang pemilih terhadap tokoh tersebut sehingga dapat menentukan pilihannya terhadap partai politik, hal ini karena pemimpin sebagai salah satu tokoh partai memiliki keterkaitan yang sangat erat dengan partainya. Sehingga kepemimpinan atau tokoh partai merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi sikap seseorang dalam keputusan memilih partai politik (Widagdo, 2016).

Pada kesempatan ini, peneliti ingin menyampaikan beberapa poin saran sebagai berikut;

- Saran dan rekomendasi kepada Pemerintah, khususnya pemerintah di Provinsi Sulawesi Selatan, penelitian ini menemukan fakta bahwa budaya patriarki cukup atau masih berpengaruh terhadap perilaku memilih masyarakat. Jadi, Lembaga legislatif dan eksekutif Provinsi Sulawesi Selatan harus bersinergi dan lebih massif lagi dalam mengedukasi masyarakat terkait pemahaman gender untuk menghilangkan segala jenis bentuk praktik patriarki, jika ingin keterwakilan perempuan meningkat, minimal mencapai kouta 30 persen yang telah disediakan.
- Saran kepada responden, berlandaskan data bahwa mayoritas responden sangat setuju dengan memilih perempuan berdasarkan *privilege* yang dimiliki caleg perempuan. Untuk tidak menjadikan hal tersebut sebagai alasan utama untuk memilih, masih banyak hal lain yang lebih substantial dapat dilihat dari caleg perempuan, misalnya rekam jejak, visi/misi dan lain sebagainya.

